

Pencegahan Korupsi:

Tantangan Etika Administrasi Negara di Indonesia

Kuliah Umum

Di Universitas Hang Tuah
Surabaya, 13 Januari 2015

Wahyudi Kumorotomo, PhD

Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Agenda Kuliah Umum

1. Masalah akut korupsi: Apa pentingnya Etika?
2. Fenomena korupsi politik dan korupsi birokratis
3. Masalah daya saing bangsa: Reformasi birokrasi yg mementingkan nilai (*value*)
4. Pengembangan budaya akuntabilitas.

FAKTA TENTANG KORUPSI DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

- 1. Korupsi adalah pangkal dari semua masalah (*the root of all evil*).**
- 2. Pejabat korup, pengusaha mendorong korupsi.**
- 3. Trust rendah = penyalahgunaan kepercayaan meningkat**
- 4. Korupsi & penyalahgunaan kepercayaan adalah “budaya Indonesia”?**
- 5. Korupsi pegawai bukan karena gaji kurang, suap pengusaha bukan karena profit menurun**
- 6. Pertimbangan moral vs. Pertimbangan hukum.**

APA PENTINGNYA ETIKA?

1. Norma yang bersifat universal
2. Menentukan keberlangsungan peradaban manusia
3. Selalu relevan sepanjang masa
4. Sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa
5. Mempertanyakan kewajiban manusia sebagai “manusia”
6. Etika Pemerintahan menentukan kemakmuran ekonomi rakyat.

Peningkatan Kemakmuran: Jepang vs. Filipina

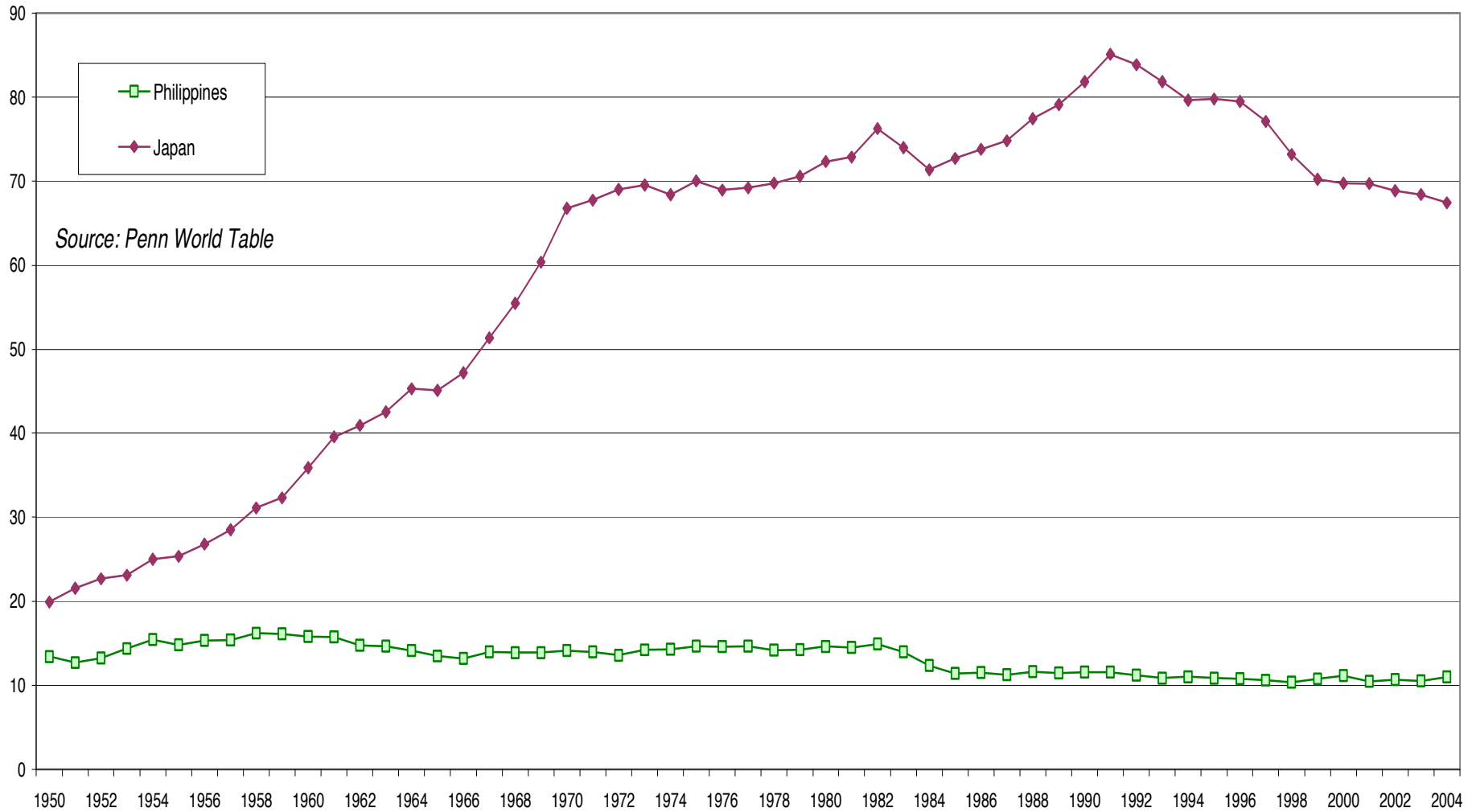


Figure 2B -- Japan & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

Cina vs. Filipina

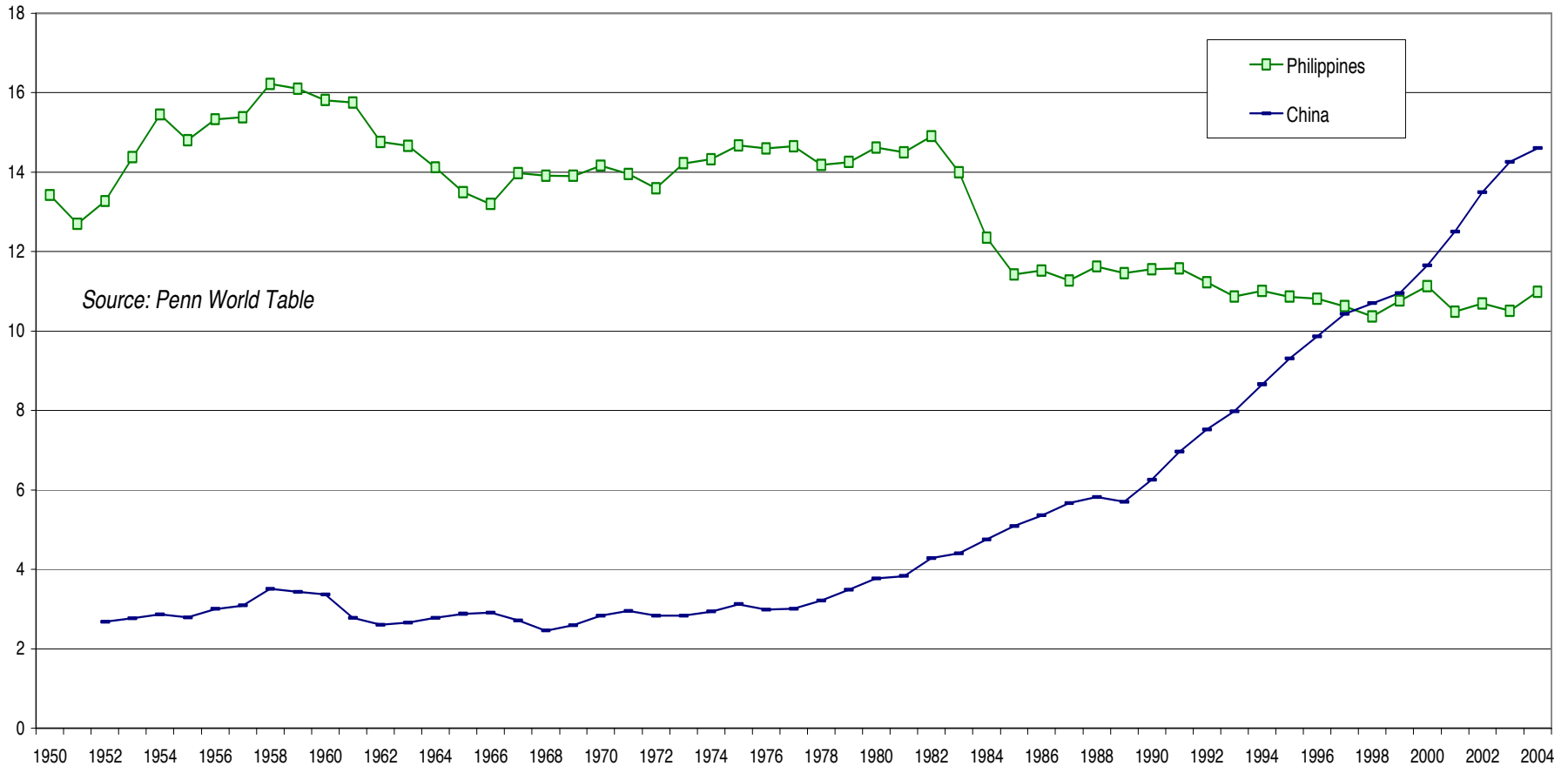
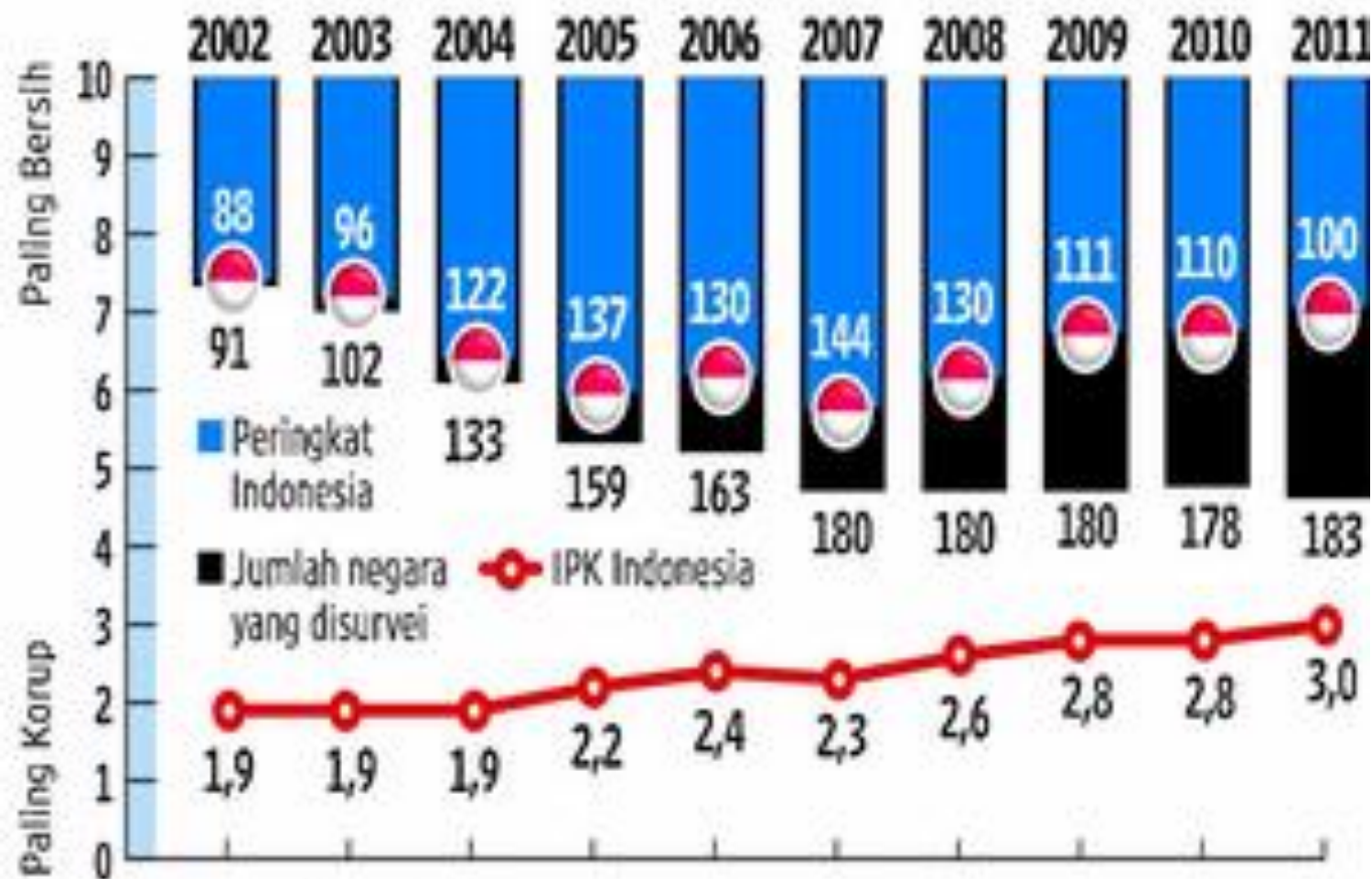


Figure 8B -- China & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



Sumber: Transparency International

GUNAWAN

50 Kota yang Disurvei dan IPK Indonesia 2010



No Kota	IPK	No Kota	IPK	No Kota	IPK
1. Denpasar	6,71	18. Sibolga	5,15	35. Tanjung Pinang	4,55
2. Tegal	6,26	19. Palu	5,10	36. Pontianak	4,52
3. Surakarta	6,00	20. Padang	5,07	37. Mamuju	4,45
4. Yogyakarta	5,81	21. Purwokerto	5,06	38. Jakarta	4,43
5. Manokwari	5,81	22. Bandung	5,04	39. Ternate	4,42
6. Gorontalo	5,69	23. Palangkaraya	5,03	40. Bengkulu	4,41
7. Tasikmalaya	5,68	24. Pematang Siantar	5,02	41. Jayapura	4,33
8. Balikpapan	5,58	25. Semarang	5,00	42. Sorong	4,26
9. Kediri	5,56	26. Bandar Lampung	4,93	43. Pangkal Pinang	4,19
10. Lhok Seumawe	5,55	27. Kupang	4,89	44. Medan	4,17
11. Sampit	5,55	28. Serang	4,87	45. Malang	4,15
12. Tenggara	5,41	29. Samarinda	4,85	46. Jambi	4,13
13. Mataram	5,39	30. Batam	4,73	47. Makassar	3,97
14. Manado	5,35	31. Jember	4,71	48. Surabaya	3,94
15. Ambon	5,29	32. Palembang	4,70	49. Cirebon	3,61
16. Banjarmasin	5,20	33. Banda Aceh	4,61	50. Pekanbaru	3,61
17. Kendari	5,20	34. Padang Sidempuan	4,58		

Korupsi Birokratis:

Penerimaan Negara Tidak Optimal

- Rp 300 triliun per th uang pajak yang dibayar rakyat digerogeti mafia pajak.
- Daniel Kaufmann: “Penyuapan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara yang dikuasai oleh agen / mafia narkoba atau bekas negara komunis”.
- Kasubdit Investigasi Pajak (Darussalam): Total berkas kasus yang harus diselesaikan th 2011 ada 14.208 kasus. “Hasil sidang di pengadilan pajak tidak bisa diakses umum atas alasan kerahasiaan wajib pajak” → rawan penyimpangan & penyalahgunaan.
- Kasus Gayus: Yang disidik baru 4 perusahaan (PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, PT Dowell Anadrill Schlumberger, PT Exelcomindo, dan PT Indocement Tunggal Prakasa). Bgm dg 149 perusahaan yg “digarap” Gayus?

Personil Mafia Pajak



Gayus



Bahasyim



Dhana

Fakta:

- Target penerimaan pajak dlm APBN 2012: Rp 1.019 triliun.
- ICW: Rp 300 triliun dari potensi pajak bocor.
- Pengadilan pajak (periode 2002-2009): 22.105 perkara; wajib pajak memenangi 61% perkara. Apa artinya?
- Selama 10 tahun terakhir, rerata tax coverage hanya 65%, tax effort th 2011 hanya 13,3% thd PDB (terendah di ASEAN).

Mafia Pajak Melibatkan Semua Level

- Th 2008, Ditjen pajak melakukan pemeriksaan dan ditemukan dugaan rekayasa pajak sebesar Rp. 2,1 triliun atas tiga perusahaan Bakrie . Mereka terdiri dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp 1,5 triliun, PT Arutmin Indonesia sebesar US\$ 30,9 juta dan PT. Bumi sebesar Rp. 376 milyar.



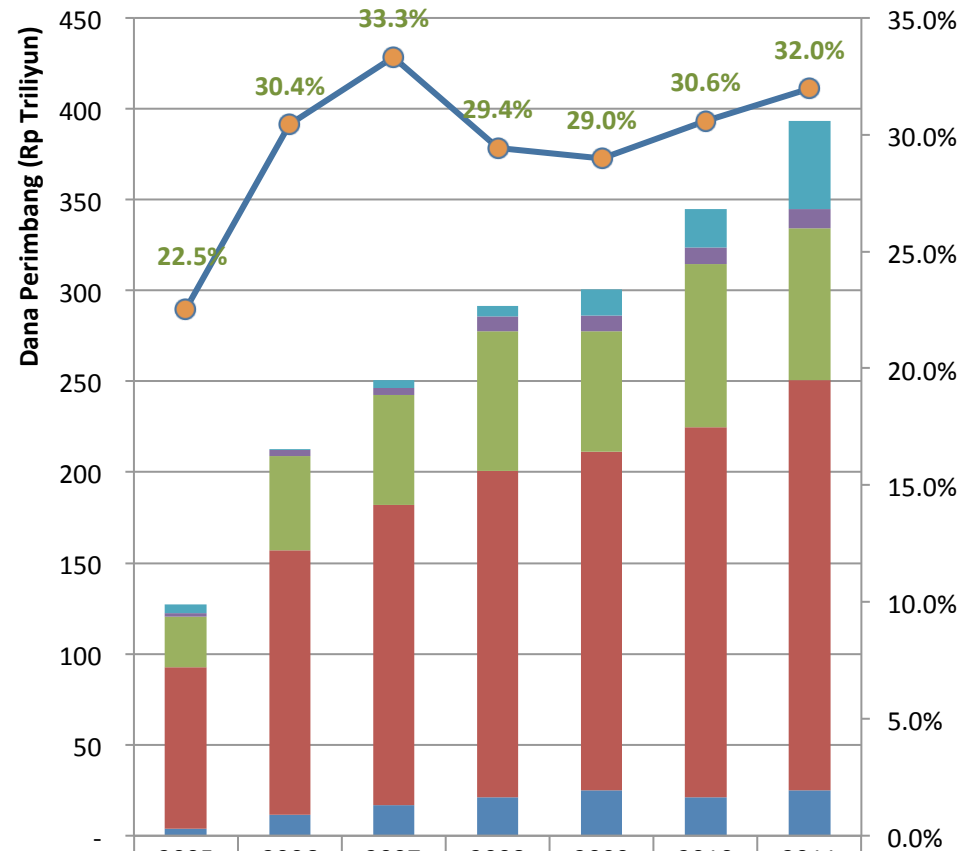
- Siswanto, tukang sapu KKP Gubeng, Surabaya; Punya Innova dan 3 rumah mewah, pendapatan Rp 50 jt. → Terlibat pemalsuan faktur pajak.

Korupsi Politik Membuat Belanja Pemerintah Kurang Efektif

- Korupsi politik: melibatkan politisi di DPR, Kementerian, Parpol, pejabat Pemda dan DPRD.
- Dana APBN banyak digunakan untuk kepentingan Parpol, digerogoti untuk berbagai macam “fee”, tidak fokus pada kebutuhan rakyat.
- Biaya birokrasi semakin membengkak, belanja modal untuk kepentingan publik menyusut.
- Dana APBD banyak digunakan untuk politik uang pejabat petahana, biaya prosedural politik yg mahal, untuk dana taktis KDH, dsb.

Dana Penyesuaian = “Gentong Babi”

- Alokasi dana “gentong babi” (*pork barrel*) dikritik habis-habisan oleh publik pada th 2005. Tapi DPR tetap jalan terus dg berbagai alasan.
- Pada TA 2012, Dana Penyesuaian mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun.



Dana Penyesuaian	4,703	301	4,362	5,806	14,490.0	21,150.0	48,235
Otsus	1,775	3,488	4,046	8,180	8,857	9,099.6	10,421
DBH	27,977	51,638	60,502	76,585	66,073	89,618	83,558
DAU	88,766	145,664	164,787	179,507	186,414	203,607	225,533
DAK	4,014	11,570	17,048	21,202	24,820	21,138.4	25,233
% Dana Perimbangan Thd APBN	22.5%	30.4%	33.3%	29.4%	29.0%	30.6%	32.0%

Korupsi Politik dan Birokrasi



- Anggota DPR meminta *fee* dari kontraktor swasta yang akan memenangkan proyeknya.
- Kepala daerah menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompok bersama “mitra” swasta.



- Politisi daerah (anggota DPRD) meminta jatah dari setiap proyek pembangunan yg disetujui, meminta “uang sukses” dari Calon Kepala Daerah dan rekanan swasta.

KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA BANGSA TERSEBUT



www.reason.com

Bangsa India dan Mesir, umurnya lebih dari 2.000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang dalam pola hidup yang tidak pernah berubah (dan tetap miskin).



eharfoush.blogspot.com©

KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA BANGSA TERSEBUT



www.aviationadvertiser.co.au

Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, adalah negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun. Tetapi saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.



www.infocomsingapore.sg



www.bcbudget.gov.bc.ca











Apa Prinsip Masyarakat di Negara Maju?

1. Etika, sebagai prinsip dasar dlm kehidupan sehari-hari.
2. Kejujuran dan integritas
3. Bertanggung jawab
4. Hormat pada aturan & hukum masyarakat
5. Hormat pada hak orang/warga lain
6. Cinta pada pekerjaan
7. Berusaha keras untuk menabung & investasi
8. Mau bekerja keras
9. Tepat waktu.

Korupsi dan Penyimpangan Membuat Pemanfaatan Sumberdaya Kurang Efektif

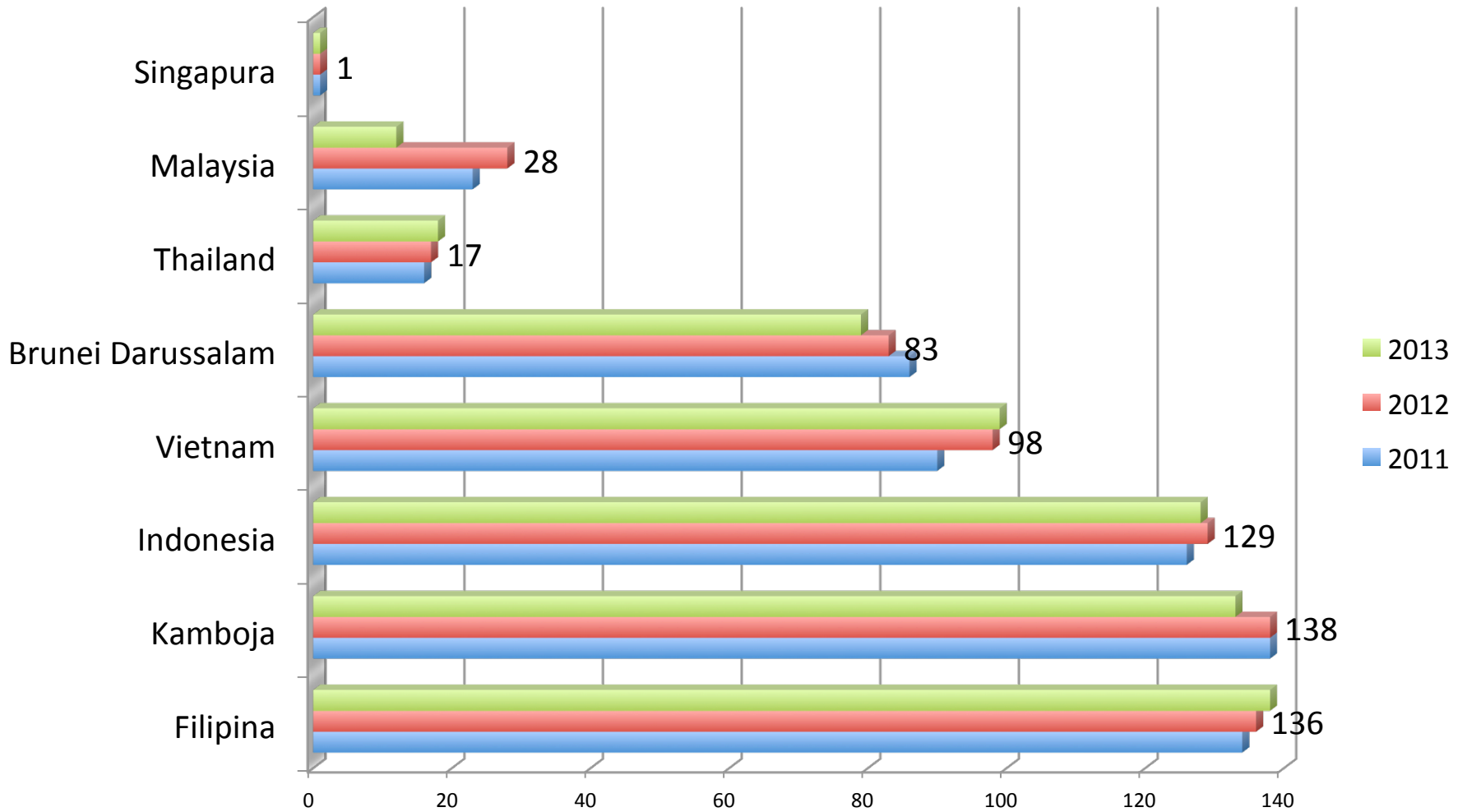
1. Kebocoran & korupsi anggaran terjadi di kedua sisi: pendapatan (*revenues*) dan belanja (*expenditure*).
2. Ekonomi tumbuh (prediksi 2012: 6,3%), tetapi bukan karena didukung anggaran pemerintah.
3. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
4. Peran anggaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat semakin turun.
5. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
6. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
7. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

Doing Business Ranking: Indonesia *)

Topics	2013 Rank	2012 Rank	Change in Rank
Starting a business	166	161	 -5
Dealing with construction permits	75	72	 -3
Getting electricity	147	158	 11
Registering property	98	99	 1
Getting credit	129	127	 -2
Protecting investors	49	46	 -3
Paying taxes	131	129	 -2
Trading across borders	37	40	 3
Enforcing contracts	144	145	 1
Resolving insolvency	148	149	 1

*) Peringkat dari 185 negara. Sumber: www.doingbusiness.org

Business Climate Ranking



Masalah Mendasar: Integritas dan Profesionalisme

1. Profesionalisme relatif mudah untuk dikembangkan. Tapi soal integritas pejabat publik perlu Reformasi Birokrasi yg mendasar, komitmen yg kuat, dan generasi baru birokrat yg bersih.
2. Persoalan integritas pejabat publik terjadi karena **budaya korup**: ingin kaya secara instan, sikap hidup menerabas, kecenderungan menyalahgunakan kewenangan, masyarakat yg permisif thd korupsi.
3. Reformasi birokrasi bukan sekadar penambahan remunerasi. Dalam banyak kasus, remunerasi tidak mencegah pegawai untuk korupsi.
4. Sanksi hukum yg berat dan konsisten bagi koruptor; Tindakan disiplin yg ketat bagi *under-performance* & sikap tidak profesional; Pencegahan (Mis: melawan budaya suap) adalah yg paling efektif dlm jangka panjang.

Sanksi Sosial: Landasan Etika Kita



John Perzel, wakil rakyat Pennsylvania yg jadi tersangka korupsi.



Sanksi sosial yg tidak konsisten membuat kita permisif terhadap tindak pidana korupsi.

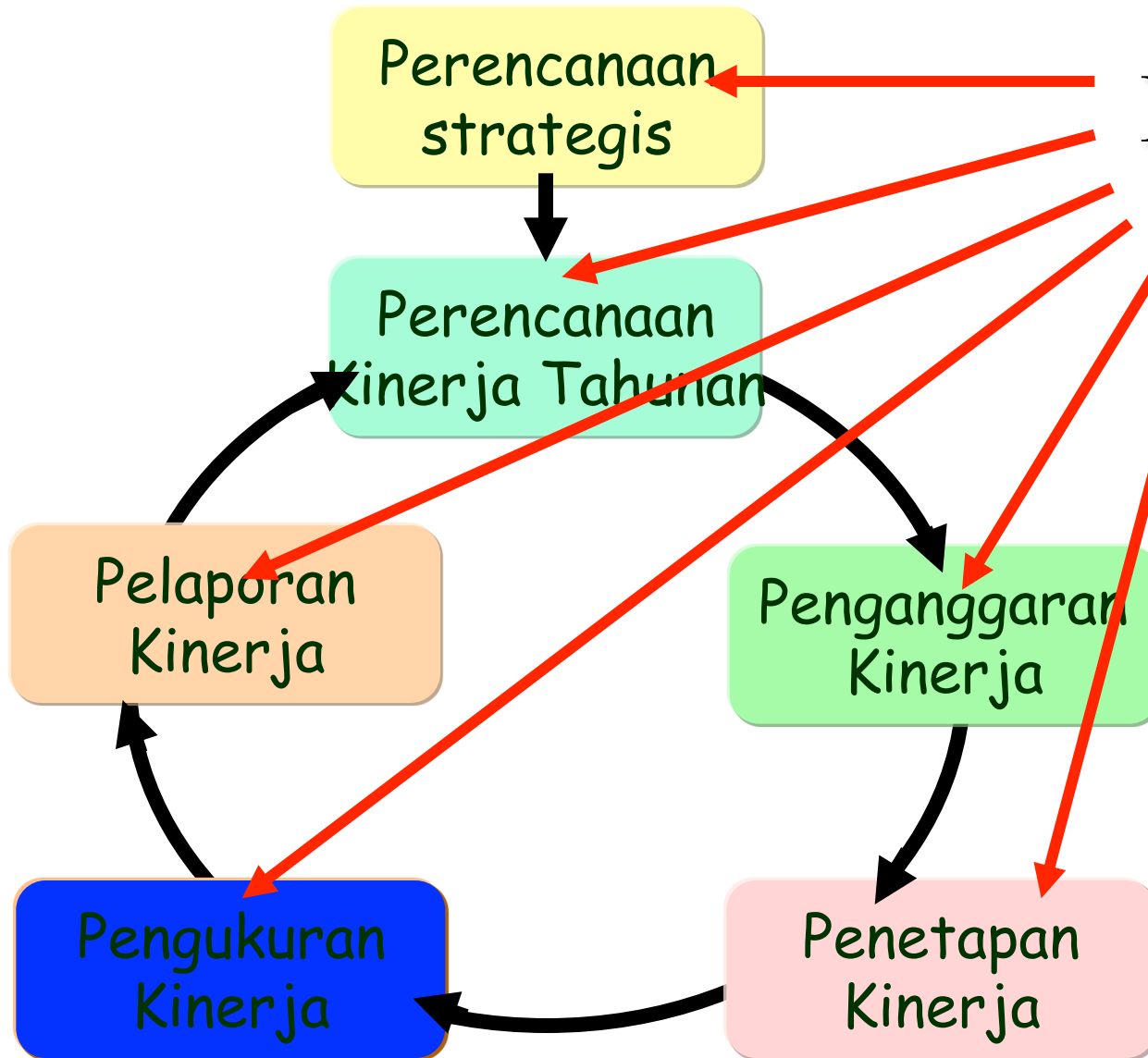
MEMBUDAYAKAN AKUNTABILITAS (Stewart, 1989)

1. ***Policy Accountability*, akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat**
2. ***Program Accountability*, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai**
3. ***Performance Accountability*, akuntabilitas terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat**
4. ***Process Accountability*, akuntabilitas atas proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.**
5. ***Probity and Legal Accountability*, akuntabilitas atas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.**

“TRIPLE ACCOUNTABILITY” UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub (**akuntabilitas ke atas**):
 1. 26 urusan wajib
 2. 8 urusan pilihan
 3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD (**akuntabilitas ke samping**):
 1. LKPJ akhir tahun anggaran
 2. LKPJ akhir masa jabatan
 3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik (**akuntabilitas ke luar**):
 1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
 2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

Siklus Akuntabilitas Kinerja & IK



Indikator
Kinerja

Indikator
Kinerja
merupakan
unsur penting
Akuntabilitas
Kinerja

Kinerja dan Etos Kerja:

Terobosan UU No.5/2014 ttg ASN

1. Pemisahan yg jelas pegawai “honorer” (skrg PPPK) dg PNS. PPPK tdk otomatis menjadi PNS; bagi PNS berlaku evaluasi sistematis.
2. Pengembangan karir lebih jelas. Tiga kategori: JPT, jabatan fungsional, jabatan administrasi; Karir tidak tergantung pangkat & jabatan, tetapi kompetensi.
3. Kelembagaan manajemen SDM: Kemenpan & RB, Kemdagri, LAN, BKN. KASN sbg “*Civil Service Commission*” tingkat nasional.
4. PNS adalah profesi. Semestinya tidak ada lagi intervensi politik dalam rekrutmen dan promosi PNS (?)
5. Efektivitas tergantung pelaksanaannya. Agenda: pembentukan KASN (6 bln), 17 PP (2 th).

Disiplin & Etos Kerja

1. Penegakan disiplin penting bagi PNS, tetapi yang jauh lebih penting adalah peningkatan kinerja.
2. Mekanisme evaluasi kinerja PNS hendaknya tidak bersifat prosedural, tetapi benar-benar mengarah kepada tercapainya kinerja sektor publik dan *good governance*.
3. Perlu keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS; Peningkatan remunerasi sering tidak disertai dengan peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja PNS yang transparan, objektif, dan konsisten.
4. Pada akhirnya setiap upaya penegakan disiplin harus berawal dan berakhir dengan itikad baik; Kondisi hubungan kerja di dalam jajaran PNS di Indonesia masih belum kondusif untuk penguatan komitmen pejabat publik dan penciptaan evaluasi kinerja yang ketat dan berkesinambungan.

Untuk mengurangi korupsi, pencegahan harus seiring dengan penindakan / penegakan hukum.

Penerapan nilai-nilai etika administrasi negara (profesionalisme, amanah/anti-korupsi, etos kerja) memerlukan proses penyadaran yang berkesinambungan dengan komitmen seluruh unsur bangsa.

TERIMA KASIH